TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGENAAN TARIF ROYALTI MUSIK PADA LAYANAN PUBLIK BERSIFAT KOMERSIAL BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2021

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Oleh:
FITRI AMALIA
02011381823294

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
2023

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

LEMBARAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA	: FITRI AMALIA
NIM	: 02011381823294
PROGRAM KEKHUSUSAN	: HUKUM PERDATA

JUDUL

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGENAAN TARIF ROYALTI MUSIK PADA LAYANAN PUBLIK BERSIFAT KOMERSIAL BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2021

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Komprehensif pada 24 Desember 2022 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 12 Januari 2023

Menyetujui:

Pembimbing Utama,

Muhamad Rasyid, S.H., M.Hum.
NIP. 196404141990011001

Pembimbing Pembantu,

Sri Handayani, S.H., M.Hum.
NIP. 197002071996032002



Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa	: Fitri Amalia
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011381823294
Tempat/Tanggal Lahir	: Palembang, 23 Februari 2001
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi mana pun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapa pun tanpa mencantumkan sembernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Januari 2023

Yang Menyatakan,



Fitri Amalia

NIM. 02011381823294

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

"*Life isn't hundred-meter race against your friends, but a lifelong marathon against yourself*"

- Haemin Sunim

Skripsi ini ku persembahkan kepada:

1. Kedua Orang Tuaku;

2. Keluargaku;

3. Sahabat-sahabatku;

4. Almamaterku.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Rasa syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT. yang mana atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Pengenaan Tarif Royalti Musik Pada Layanan Publik Bersifat Komersial Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021". Penulisan skripsi ini berjalan lancar atas dukungan orang tua, bapak dan ibu pembimbing yang telah membimbing saya agar skripsi ini bukan hanya sekadar penelitian akhir, namun juga dapat bermanfaat di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu penulis dalam melancarkan proses penelitian skripsi ini.

Pada penulisan skripsi ini penulis sadar bahwa masih ada kekurangan, namun penulis berharap bahwa skripsi yang ditulis akan berguna dan bermaaf untuk mendalami pemahaman bagi penulis dan semua pihak yang membaca skripsi ini.

Palembang, 8 Januari 2023
Penulis,

Fitri Amalia
NIM. 02011381823294

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, dan saran yang telah diberikan dalam penelitian skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.Cl., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin., S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata;
6. Bapak Muhamad Rasyid, S.H., M.Hum., selaku pembimbing utama yang telah memberikan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
7. Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum., selaku pembimbing pembantu yang telah memberikan waktunya dan segala perhatian untuk membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini;
8. Bapak Usmawadi, S.H., selaku pembimbing akademik penulis yang pernah memberikan arahan kepada penulis saat penulis masih menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

9. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum., selaku pembimbing akademik penulis saat ini yang telah memberikan bimbingan kepada penulis saat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.Hum., selaku Ketua Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu dan memberikan selama proses PLKH dan KHL;
11. Terima kasih kepada Bapak Idris selaku Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan, mewakili Kepala Kantor Wilayah yang telah memberikan izin kepada Penulis untuk melakukan penelitian di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM;
12. Terima kasih kepada Kak Hendra Kesuma dan rekan yang telah membantu Penulis dengan meluangkan waktunya untuk diwawancara;
13. Terima kasih kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu kepada mahasiswa-mahasiswanya;
14. Kedua Orang Tua saya, Mbak Put, Mbak Wi, Yuk Ima dan Kakak yang telah memberikan dukungan kepada saya sampai saat ini;
15. Terima kasih kepada seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
16. Terima kasih kepada saya sendiri karena sudah berjalan sejauh ini, semoga ke depannya masih dapat terus belajar dan berjalan untuk ilmu yang baru;
17. Sahabat seperjuangan saya Kak Vira, Kak Bila, Rora, Dwi, Alya dan Sinmel yang telah menemani waktu perkuliahan saya selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

18. Sahabat saya Lidya Annisa yang telah menemani perjalanan saya dari saya kecil sampai saat ini;
19. Sahabat saya Putri Vinarica yang masih selalu menjadi tempat saya untuk bercerita, yang selalu meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita perkuliahan dan memberi saran yang membantu;
20. Sahabat saya Bekdel yang selalu menyemangati saya dengan kata-kata motivasinya;
21. Orang yang selalu mendukung dan menyemangati saya, M. Afiiq Naufal;
22. Seluruh teman-teman Tim 5 PLKH yang telah menemani saya selama satu semester diperkuliahan;
23. TIM Klinik Hukum Lingkungan (KHL) yang telah menemani selama satu semester di perkuliahan;
24. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini, nama kalian tetap tertulis di dalam hati saya.

Semoga amal baik yang diberikan semua pihak mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT. dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Palembang, 8 Januari 2023
Penulis,



Fitri Amalia
NIM. 02011381823294

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI ii
SURAT PERNYATAAN iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... iv
KATA PENGANTAR v
UCAPAN TERIMA KASIH vi
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TABEL xii
DAFTAR BAGAN xiii
ABSTRAK xiv

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 12
C. Tujuan Penelitian 13
D. Manfaat Penelitian 13
E. Ruang Lingkup 14
F. Kerangka Teori 14
1. Teori Kepastian Hukum 14
2. Teori Akibat Hukum.....15
3. Teori Perlindungan Kekayaan Intelektual 16
G. Metode Penelitian 18
1. Jenis Penelitian 18
2. Pendekatan Penelitian 19
3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum 20
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 23
5. Analisis Bahan Hukum.....23
6. Teknik Penarikan Kesimpulan 24

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 25
A. Tinjauan Umum Kekayaan Intelektual 25
1. Sejarah Kekayaan Intelektual 25
2. Pengertian Kekayaan Intelektual 28
3. Pengaturan Kekayaan Intelektual 30
4. Macam-Macam Kekayaan Intelektual 35
5. Perlindungan Kekayaan Intelektual 45
B. Tinjauan Umum Hak Cipta 48
1. Pengertian Hak Cipta 48
2. Pengaturan Hak Cipta 50
3. Ruang Lingkup Hak Cipta 55
4. Subjek Hak Cipta 58
5. Hak Terkait dengan Hak Cipta 59
6. Hak Moral dan Hak Ekonomi Dalam Hak Cipta 60
7. Pelanggaran Hak Cipta 66
C. Tinjauan Umum Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) 71
1. Pengertian Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) 71
2. Wewenang Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) 72
3. Hubungan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dengan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) 74
D. Tinjauan Umum Royalti Lagu dan/atau Musik 75
1. Pengertian Royalti Lagu dan/atau Musik 75
2. Pengaturan Royalti Lagu dan/atau Musik 80
3. Besaran Tarif Royalti Lagu dan/atau Musik.....82
4. Tata Cara Pengelolaan Royalti Lagu dan/atau Musik 83
BAB III PEMBAHASAN 86
A. Mekanisme Pengelolaan Royalti Lagu dan/atau Musik Pasca Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 86
B. Akibat Hukum Layanan Publik Bersifat Komersial yang Belum Melakukan Pembayaran Royalti Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 113

BAB IV PENUTUP 126
A. Kesimpulan 126
B. Saran 128

DAFTAR PUSTAKA 130
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1 Daftar Lembaga Manajemen Kolektif di Indonesia 8

TABEL 2.1 Sanksi Pidana terhadap Pelanggaran Hak Cipta 69

TABEL 3.1 Besaran Tarif Royalti Pada Jenis-Jenis Layanan Publik 101

TABEL 3.2 Tarif Royalti Jenis Rumah Bernyanyi (Karaoke) 104

TABEL 3.3 Total Distribusi Royalti Lagu dan/atau Musik 108

DAFTAR SKEMA

SKEMA 3.1 Mekanisme Pengelolaan Royalti Sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 110

SKEMA 3.2 Mekanisme Pengelolaan Royalti Setelah Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 111

Nama : Fitri Amalia
NIM : 02011381823294
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Pengenaan Tarif Royalti Musik Pada Layanan Publik Bersifat Komersial Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021

ABSTRAK

Hak Cipta termasuk pada salah satu Kekayaan Intelektual (KI) yang dilindungi. Pengaturan mengenai hak cipta selalu direvisi dengan mengikuti perkembangan dari masyarakat agar sesuai dengan tuntutan hukum yang ada. Permasalah hukum yang dibahas dalam skripsi ini yaitu mengenai mekanisme pengelolaan royalti lagu dan/atau musik pasca Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, dan akibat hukum layanan publik bersifat komersial yang belum melakukan pembayaran royalti sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang didukung dengan data lapangan sebagai pelengkap yang menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Aprroach*) dan pendekatan Analisis (*Analytical Approach*). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1. Mekanisme Pengelolaan Royalti Lagu dan/atau Musik Pasca Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 yaitu dengan adanya Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik (SILM) yang mengambil data yang terdapat pada Pusat Data Lagu dan/atau Musik (PDLM), 2. Akibat hukum yang dikenakan kepada layanan publik bersifat komersial yaitu dapat berupa sanksi perdata dan sanksi pidana. Sanksi diberikan kepada pelanggar apabila penyelesaian dengan alternatif penyelesaian sengketa tidak dapat menemukan titik terang.

Kata Kunci: *Akibat Hukum, Mekanisme, Musik, Royalti*

Pembimbing Utama,

Muhamad Rasyid, S.H., M.Hum.
NIP. 196404141990011001

Pembimbing Pembantu,

Sri Handayani, S.H., M.Hum.
NIP. 197002071996032002

Ketua Bagian Hukum Perdata,

Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi nasional merupakan salah satu jalan yang ditempuh Indonesia untuk mencapai suatu tujuan dalam memajukan kesejahteraan umum sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) pada alinea ke-4.[1] Pada pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional, salah satu hal yang menjadi minat yaitu pada bidang ekonomi atau industri kreatif.[2] Pemerintah di Indonesia memberikan perlindungan pada ekonomi kreatif yaitu dengan adanya pengaturan mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu hak eksklusif yang muncul terhadap individu atau kelompok individu yang telah menuangkan kemampuan pikiran mereka sehingga menjadi suatu karya intelektual.[3]

Istilah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Rights* (IPR) tidak digunakan lagi di Indonesia, hal ini dapat dilihat pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Pada Pasal 25 Bagian Ketujuh Peraturan Presiden menyebutkan "Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual" bukan

[1]Lihat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

[2]Mayesha Andriana, dkk, "Kewajiban Mediasi Sebelum Gugatan Ganti Rugi Perdata Atas Pelanggaran Hak Cipta di Indonesia", *Repertorium Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Vol. 10 No.2, 2021, hlm. 158.

[3]Lembaga Kawasan Sains dan Teknologi (LKST) IPB University, *Pengertian KI dan HKI*, https://dik.ipb.ac.id/ki-hki/, pada 21 Januari 2022.

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.[4] Hal tersebut menjadi alasan istilah Kekayaan Intelektual (KI) mulai digunakan pada saat ini.

Hanya sedikit orang di dunia yang diakui sebagai pemilik suatu hak cipta 100 tahun yang lalu, di antara mereka yaitu seorang seniman misalnya seorang penulis, pelukis, dan musisi. Hingga saat ini, orang-orang yang terlibat dalam kegiatan kreatif tersebut hanya terbatas pada para profesional, dan mereka yang memanfaatkan karya mereka juga terbatas pada beberapa jenis industri seperti media massa, perusahaan film, dan sebagainya. Dengan kata lain, jika masyarakat umum tidak tahu tentang hak cipta, maka mereka tidak akan tahu betapa pentingnya hak cipta di kehidupan sehari-hari.[5]

Kemerdekaan Indonesia memengaruhi peraturan mengenai hak cipta yang telah berlaku sejak zaman pemerintahan Kolonial Belanda yaitu *Auteurswet* Stb. No. 600 Tahun 1912, kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta.[6] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 menjadi salah satu produk hukum Indonesia dalam menggantikan peninggalan dari hukum Kolonial Belanda walaupun 5 tahun kemudian undang-undang tersebut dengan berbagai pertimbangan terpaksa harus direvisi ulang karena beberapa hal dinilai belum sesuai dengan tuntutan hukum yang ada di masyarakat.[7] Setelah terjadi beberapa kali revisi terhadap undang-undang hak cipta, maka pada waktu ini

---

[4]Ni Ketut Supasti Dharmawan, dkk. *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, Yogyakarta: Deepublish, 2016, hlm. 14.

[5]Hozumi, Tamotsu, *ASIAN Copyright Handbook Indonesian Version*, Jakarta: Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi), hlm. 42.

[6]OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 3-4.

[7]*Ibid*.

undang-undang hak cipta yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Hak cipta merupakan suatu kebebasan kreativitas yang dijamin perlindungannya oleh hukum. Seperti tercantum pada Konvensi Internasional PBB dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.[8] Kecerdasan intelektual masyarakat di suatu negara sangat ditentukan pada seberapa baik individu di negara tersebut menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Tidak mudah bagi mereka untuk menciptakan karya yang berkualitas dan memiliki nilai yang tinggi, semuanya membutuhkan banyak tenaga dan sering kali memakan biaya yang tidak sedikit dalam mengerjakan suatu karya. Oleh karena itu, sudah sepatutnya karya yang diterbitkan tersebut dihargai dengan memberi perlindungan hukum.[9]

Perlindungan hukum hak cipta tidak dapat diberikan apabila karya tersebut hanya tertuang pada ide atau gagasan saja, namun harus ada suatu perwujudan dari ide atau gagasan tersebut.[10] Maka pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2014, dirumuskan bahwa:[11]

> "Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

---

[8]Hozumi Tamotsu, *Op. cit*, hlm. 2.

[9]OK. Saidin, *Op. cit*, hlm. 195.

[10]Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*, Jakarta: Tanpa Penerbit, 2020, hlm. 15.

[11]Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

Ada persyaratan agar seseorang yang memiliki ciptaan atau pencipta dapat melakukan perlindungan hukum terhadap suatu ciptaannya, antara lain:[12]

1. *Fixed*, berdasarkan doktrin *fixation*, apabila seseorang ingin dilindungi oleh Hak Cipta maka pikiran atau gagasan tersebut harus diwujudkan dalam entitas yang sebenarnya.
2. *Form*¸ melihat pada *fixation* suatu ciptaan haruslah memiliki bentuk tertentu (*form*).
3. *Original*, dapat dikatakan bahwa ciptaan tersebut merupakan karya yang baru atau tidak pernah ada sebelumnya.

Dasawarsa terakhir perubahan teknologi membuat semua bidang hampir dibuat menjadi serba digital mulai dari sektor kesehatan sampai pada sektor hiburan.[13] Perbedaan dapat dirasakan dengan adanya era digital yang membuat gaya hidup manusia lebih praktis, baik dalam menerima maupun mengirim informasi ke berbagai belahan dunia.[14] Salah satu teknologi yang mengalami perubahan tersebut yaitu internet. Meluasnya penggunaan internet di segala bidang juga menimbulkan akibat positif maupun negatif yang tak dapat dihindari.[15]

---

[12]Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *op.cit.* hlm. 16.

[13]Desak Komang Lina dan I Gusti Ngurah Parwata, "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penggunaan Lagu Sebagai Suara Latar Video di Situs Youtube", *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana Vol. 7 No. 10, 2019, hlm. 2.

[14]Murni Eva Marlina Rumapea, "Tantangan Pembelajaran Musik pada Era Digital (*Challenges of Learning Music in Digital Era*), *Gondang: Jurnal Seni dan Budaya* Program Studi Pendidikan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan Vol. 3 No.2, 2019, hlm. 102.

[15]Ghaesany Fadhila dan U. Sudjana, "Perlindungan Karya Cipta Lagu dan/atau Musik yang Dinyanyikan Ulang *(Cover Song)* di Jejaring Media Sosial Dikaitkan dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Acta Jurnal: Jurnal Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an* Universitas Padjadjaran Vol. 1 No. 2, 2018, hlm. 223.

Teknologi juga berdampak pada hak cipta, khususnya pada lagu dan/atau musik. Sekarang, siapa saja dapat mengakses lagu dan/atau musik yang tak terjumlah adanya. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), musik merupakan seni dalam menyusun nada sehingga memiliki kesatuan. Merujuk pada Pasal 40 ayat (1), musik dan/atau lagu menjadi suatu ciptaan yang dilindungi pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.[16]

Pencipta musik atau lagu memiliki hak eksklusif atas ciptaannya yang tidak dapat dialihkan atau digunakan tanpa izin pencipta. Sekalipun hak cipta telah dialihkan, pencipta tetap memiliki hak moral atas ciptaan tersebut.[17] Sedangkan hak ekonomi yaitu hak pencipta dalam mendapatkan keuntungan dari ciptaannya.[18] Hak ekonomi yang telah dialihkan kepada pihak lain selain pencipta tidak menghilangkan hak moral pencipta atas ciptaan tersebut.[19]

Pada Pasal 9 ayat (1) dirumuskan bahwa:[20]

Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:
a. penerbitan Ciptaan;
b. penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
c. penerjemahan Ciptaan;
d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
e. pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
f. pertunjukan Ciptaan;
g. pengumuman Ciptaan;
h. komunikasi Ciptaan; dan

[16]Komang Ardika dan Marwanto, "Pemanfaatan Lagu Secara Komersial Pada Restoran Serta Keberadaan Pengunjung yang Menyanyikan Lagu Secara *Volunteer*", *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana Vol. 7 No. 6, 2019, hlm. 4.

[17] Ermansyah Djaja, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm, 8.

[18]*Ibid*.

[19]Gracelina Jesyca Carmety Nyaman, dkk, "Perlindungan dan Pengelolaan Hak Royalti Pencipta Melalui Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021", *Wijayakusuma Law Review* Fakultas Hukum Universitas Janabadra, Vol. 3 No. 1, 2021, hlm. 3.

[20]Lihat Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

i. penyewaan Ciptaan.

Pemanfaatan terhadap musik dan/atau lagu harus atas izin dari pencipta, khususnya apabila musik dan/atau lagu terkait digunakan untuk sesuatu yang bersifat komersial. Penggunaan komersial yaitu memanfaatkan suatu ciptaan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan ekonomi.[21] Salah satu pemanfaatan yang sering kita temui yaitu memutar musik dan/atau lagu dan melakukan pertunjukkan musik dan/atau lagu pada layanan publik yang bersifat komersial, seperti kafe maupun restoran agar pengunjung dapat menikmati hiburan tersebut.[22] Pemutaran dan pertunjukkan lagu dan/atau musik yang dilakukan layanan publik bersifat komersial harus membayar royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).

Menurut situsnya, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) merupakan lembaga pemerintah yang berwenang untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti bagi pengguna komersial yaitu layanan publik bersifat komersial. Hal tersebut seperti yang telah diatur dalam:[23]

a. Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
b. Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik;
c. Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif.

---

[21] Komang Ardika dan Marwanto, *loc. cit.*
[22] *Ibid*.
[23] Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), *Seputar LMKN*, diakses dari https://www.lmkn.id/faq/, pada 04 April 2022.

Pemilik hak royalti pada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional terbagi menjadi dua, yaitu:[24]

1. Pemegang Hak Cipta

Pemegang hak cipta adalah orang yang pertama kali menciptakan ciptaan, pihak yang secara sah memperoleh hak dari pencipta, atau tiap orang yang kemudian memperoleh hak tersebut dari pihak yang telah memperoleh hak secara sah.

2. Pemegang Hak Terkait

Pemegang hak terkait dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Produser Fonogram

Produser Fonogram adalah orang atau badan hukum yang menjadi pencipta asli suatu rekaman, baik rekaman pertunjukan maupun rekaman jenis suara lainnya.

b. Pelaku Pertunjukan

Pelaku pertunjukan adalah seorang atau sekelompok individu yang menampilkan dan memamerkan suatu karya.

Pengumpulan dan pendistribusian royalti lagu dan/atau musik tidak hanya dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) saja, namun juga dapat dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Menurut Pasal 17 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 36 Tahun 2018, Lembaga

[24]Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), *Pemilik Hak*, diakses dari https://www.lmkn.id/pemilik-hak/, pada 12 Mei 2022.

Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dapat menyerahkan wewenang kepada LMK sejenis yang ditetapkan oleh komisioner LMKN.

Perhatian para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang banyak memanfaatkan lagu dan/atau musik sebagai salah satu daya tarik terhadap bisnis yang dijalaninya, menaruh perhatian terhadap pengesahan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021.[25] Pelaku UMKM merasa keberatan dengan adanya peraturan tersebut karena penghasilan yang tidak menentu selama pandemi.

Berdasarkan situs resmi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), terdapat beberapa Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) telah terdaftar di Indonesia.

Tabel 1.1
Daftar Lembaga Manajemen Kolektif di Indonesia

No.	NAMA LMK
1.	Karya Cipta Indonesia (KCI)
2.	Wahana Musik Indonesia (WAMI)
3.	Royalti Anugerah Indonesia (RAI)
4.	Sentra Lisensi Musik Indonesia (SELMI)
5.	Anugrah Royalti Dangdut Indonesia (ARDI)
6.	Perlindungan Hak Penyanyi dan Pemusik Rekaman Indonesia (PAPPRI)
7.	Star Music Indonesia (SMI)
8.	*Performers Rights Society of Indonesia* (PRISINDO)
9.	Anugerah Royalti Musik Indonesia (ARMINDO)
10.	Pencipta Lagu Rekaman Indonesia Nusantara (PELARI)
11.	Penyanyi Profesional Indonesia Timur (PROINTIM)

Sumber:*https://www.lmkn.id/, *2022

[25]Fitri Novia Heriani, *Pemerintah Tegaskan Pengenaan Royallti Untuk Lindungi Hak Cipta*, diakses dari https://www.hukumonline.com/berita/a/pemerintah-tegaskan-pengenaan-royalti-untuk-lindungi-hak-cipta-lt60715a5e745e8, pada 03 April 2022.

Pemerintah sudah memaksimalkan perlindungan terhadap hak cipta dengan terus melakukan perbaikan agar sesuai dengan perkembangan yang ada di masyarakat. Pada 30 Maret 2021 Presiden Republik Indonesia mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.[26] Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 dibentuk untuk mempertimbangkan ketentuan Pasal 87, Pasal 89, dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Adapun rumusan-rumusan pasal tersebut yaitu:[27]

1. Pasal 87
   a. Pada ayat (1) merumuskan pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) agar mendapat hak ekonomi dari layanan publik bersifat komersial (pengguna);
   b. Pengguna membayar royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif;
   c. Pengguna menyimpulkan kontrak dengan Lembaga Manajemen Kolektif, yang mencakup kewajiban membayar biaya royalti;
   d. Tidak dianggap melanggar apabila telah melakukan kewajiban ynag timbul dari perjanjian.
2. Pasal 89
   a. Membentuk 2 Lembaga Manajemen Kolektif nasional yaitu untuk kepentingan pencipta dan pemilik hak terkait untuk mengelola royalti lagu atau musik;

[26]Komang Ardika dan Marwanto, *loc. cit*.
[27]Lihat Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

b. LMKn berwenang dalam menarik, menghimpun, mendistribusikan royalti dari pengguna;
c. Dalam melaksanakan pemungutan perlu dilakukan koordinasi dan penetapan besaran royalti yang harus dibayarkan sesua idengan praktik yang berlaku berdasar keadilan.;
d. Penetepan royalti akan disahkan oleh Menteri.

3. Pasal 90
   "Dalam melaksanakan pengelolaan hak Pencipta atau pemilik hak terkait Lembaga Manajemen Kolektif wajib melaksanakan audit keuangan dan audit kinerja yang dilaksanakan oleh akuntan publik paling sedikit I (satu) tahun sekali dan diumumkan hasilnya kepada masyarakat melalui I (satu) media cetak nasional dan 1 (satu) media elektronik".

Rumusan pada pasal-pasal di atas menjadi acuan yang mana diperlukan suatu penyusunan sistem pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik yang dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional.[28] Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 dibuat tidak hanya untuk melindungi hak yang melekat pada sebuah karya berupa lagu dan/atau musik saja, namun Peraturan Pemerintah mengatur lebih spesifik mengenai penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik yang sebelumnya tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tak luput dari perhatian masyarakat yang berkecimpung di dalamnya, seperti kalangan artis maupun akademisi yang mengikuti perkembangan terhadap pengenaan royalti lagu dan/atau musik. Tak hanya itu, para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan

[28]JDIH KEMENKO BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI, *Layanan Publik Wajib Bayar Royalti*, diakses dari https://jdih.maritim.go.id/layanan-publik-wajib-bayar, pada 04 April 2022.

Menengah yang banyak memanfaatkan lagu dan/atau musik sebagai salah satu daya tarik terhadap bisnis yang dijalaninya pun menaruh perhatian terhadap pengesahan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021.[29] Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 berupaya memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait atas lagu dan/atau musik dan juga kepada setiap orang yang menggunakan secara komersial lagu dan/atau musik.

Bentuk-bentuk layanan publik bersifat komersial telah dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021. Bentuk-bentuk layanan publik bersifat komersial tersebut antara lain seperti seminar, restoran, konser musik, kereta api, bazar, bioskop, toko, kantor, tempat rekreasi, televisi, radio, hotel, dan karaoke.[30] Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) memiliki rumusan berbeda untuk menentukan besaran royalti , hal ini dapat dilihat pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: HKI.2.OT.3.01-02 Tahun 2016.[31]

Luky Prawenda selaku Seksi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional menjelaskan bahwa setiap pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait harus bergabung menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) untuk mendapatkan royalti dari pengguna yaitu layanan publik bersifat

---

[29]Fitri Novia Heriani, *Pemerintah Tegaskan Pengenaan Royallti Untuk Lindungi Hak Cipta*, diakses dari https://www.hukumonline.com/berita/a/pemerintah-tegaskan-pengenaan-royalti-untuk-lindungi-hak-cipta-lt60715a5e745e8, pada 03 April 2022.

[30]Lihat Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021.

[31]Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, *PP Nomor 56 Tahun 2021 Atur Royalti Lagu Musik Analog Sampai Digital*, diakses dari https://dgip.go.id/artikel/detail-artikel/pp-nomor-56-tahun-2021-atur-royalti-lagu-musik-analog-sampai digital?kategori=Berita%2 0Resmi%20Desain%20Industri, pada 12 Mei 2022.

komersial.[32] Namun kenyataannya masih ada pencipta yang belum mendaftarkan lagu dan/atau musik ciptaannya kepada Lembaga Manajemen Kolektif, membuat pendistribusian royalti tidak dapat dilakukan dan pemanfaatan dari royalti lagu dan/atau musik ciptaannya tidak dapat dinikmati.

Berdasarkan hal yang telah diuraikan tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat suatu kajian mengenai royalti terhadap musik dan/atau lagu yang diputar pada layanan publik bersifat komersial dan mengaitkannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021. Penelitian dilakukan dalam sebuah skripsi yang berjudul "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGENAAN TARIF ROYALTI MUSIK PADA LAYANAN PUBLIK BERSIFAT KOMERSIAL BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2021".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan beberapa permasalahan yang akan diangkat adalah:

1. Bagaimana mekanisme Pengelolaan Royalti Lagu dan/atau Musik Pasca Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021?
2. Apa akibat hukum terhadap layanan publik bersifat komersial yang belum melakukan pembayaran royalti sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021?

[32]Moh. Dani Pratama Huzaini, *Kenali Lembaga Manajemen Kolektif, Pelaksanaan Tata Kelola Royalti Hak Cipta di Indonesia*, diakses dari https://www.hukumonline.com/berita/a/kenali-lembaga-manajemen-kolektif--pelaksana-tata-kelola-royalti-hak-cipta-di-indonesia-lt5b8668951249c, pada 02 April 2022.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diangkat pada penelitian ini, maka tujuan terhadap penulisan skripsi yang akan diteliti adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai mekanisme Pengelolaan Royalti Lagu dan/atau Musik Pasca Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai akibat hukum layanan publik bersifat komersial yang belum melakukan pembayaran royalti sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil pada penelitian berupa skripsi ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

a. Penelitian yang dilakukan penulis diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diangkat oleh penulis, khususnya mengenai royalti terhadap sebuah musik dan/atau lagu.
b. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan acuan atau referensi terhadap berbagai kalangan khususnya kalangan mahasiswa yang ingin mempelajari ilmu-ilmu baru khususnya mengenai hak cipta.

2. Manfaat Praktis

a. Penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan bermanfaat bagi penulis, praktisi baik di bidang hukum maupun bidang lainnya.

b. Penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu sebagai sumber pemahaman hukum terhadap hak cipta bagi berbagai kalangan yang terkait di dalamnya.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada penelitian ini memusatkan kepada perlindungan hukum dan akibat hukum terhadap pengenaan tarif royalti ciptaan berupa musik dan/atau lagu pada layanan publik bersifat komersial yang ditinjau berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

F. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah pelaksanaan hukum yang sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Kepastian hukum menghendaki adanya suatu upaya mengenai pengaturan hukum dalam perundang-undangan, sehingga peraturan yang dibuat memiliki aspek yuridis.[33]

[33]Fernando M. Manulang, *Hukum Dalam Kepastian*, Bandung: Prakarsa, 2007, hlm. 95.

Utrecht mengemukakan bahwa kepastian hukum tidak hanya mencakup peraturan umum sehingga individu mengetahui perilaku apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan, tetapi juga adanya jaminan hukum karena mereka dapat mengetahui apa yang dibebankan negara terhadap individu.[34]

Penulis menggunakan teori kepastian hukum dalam penelitian ini untuk mengetahui apakah Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik sudah mengatur mengenai mekanisme pendistribusian royalti sebuah lagu dan/atau musik yang belum menjadi anggota dari suatu Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).

2. Teori Akibat Hukum

Akibat hukum adalah suatu akibat dari tindakan yang telah dilakukan pelaku untuk memperoleh suatu akibat yang diinginkan dan yang telah diatur oleh hukum. Tindakan ini juga dapat dinamakan sebagai tindakan hukum, dengan kata lain akibat hukum merupakan akibat dari suatu tindakan hukum.[35] Selain itu, akibat hukum dapat didefinisikan sebagai setiap akibat dari tindakan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum

[34]Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 23.

[35] R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 291.

terhadap objek hukum atau akibat-akibat yang diakui sebagai akibat hukum yang dihasilkan dari keadaan tertentu.[36]

Beberapa wujud dari akibat hukum, yaitu:[37]

a. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum;
b. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subjek hukum, di mana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain;
c. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum;
d. Akibat hukum yang timbul karena melakukan tindakan yang telah dilarang dalam hukum apabila dalam kondisi yang wajar, namun akibat hukum tindakan tersebut dipertimbangkan dengan adanya kejadian-kejadian darurat maka.

Penulis menggunakan teori akibat hukum dalam membahas dan menganalisis akibat hukum dari layanan publik bersifat komersial yang belum melakukan pembayaran royalti sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021.

3. Teori Perlindungan Kekayaan Intelektual

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Robert M. Sherwood, terdapat 5 teori dasar yang ada pada perlindungan kekayaan intelektual, antara lain:[38]

---

[36]Artikel Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, *"Akibat Hukum"*, diakses dari http://hukum.untan.ac.id/akibat-hukum/, pada 1 Maret 2022.

[37]*Ibid*.

[38]Ranti Fausa Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*, Jakarta: Grasindo, 2004, hlm. 46.

a. *Reward Theory*

Pada *reward theory* diutarakan bahwa sebagai bentuk perlindungan kepada inventor atau pencipta diberikan penghargaan atau *reward* terhadap suatu karya intelektual yang telah dihasilkan oleh seorang pencipta.

b. *Recovery Theory*

Pada *recovery theory* dikatakan bahwa seorang penemu atau pencipta telah membuang waktu, biaya, serta tenaga dalam menghasilkan suatu karya harus diberikan kesempatan untuk memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya tersebut.

c. *Incentive Theory*

Pada *incentive theory* dikemukakan bahwa dengan memberikan insentif kepada para penemu atau pencipta dapat mendorong adanya lebih banyak lkegiatan-kegiatan penelitian yang berguna di masa yang akan datang.

d. *Risk Theory*

Pada *risk theory* berpendapat bahwa kekayaan intelektual merupakan hasil dari suatu penelitian yang mengandung risiko, sehingga wajar apabila memberikan perlindungan hukum terhadap upaya atau kegiatan yang mengandung risiko tersebut.

e. *Economic Growth Stimulus Theory*

Pada *economic growth stimulus theory* dij bahwa perlindungan atas kekayaan intelektual diakui karena hal tersebut merupakan suatu alat pembangun ekonomi, yaitu suatu sistem perlindungan kekayaan intelektual yang efektif.

Musik dan/atau lagu termasuk pada salah satu kekayaan intelektual yang dilindungi, oleh sebab itu penulis menggunakan teori perlindungan kekayaan intelektual dalam membahas dan menganalisis Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian atau *research methods* merupakan suatu cara dalam melakukan kajian dalam suatu kegiatan penelitian, sesuai dengan bidang studi yang akan dikaji.[39] Adapun metode-metode yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum normatif, didukung dengan data lapangan sebagai pelengkap untuk lebih mendapatkan gambaran utuh dalam jawaban permasalahan. Pada buku Penelitian Hukum Normatif yang ditulis oleh Soerjono Soekanto bersama Sri Mamuji mengemukakan bahwa penelitian hukum normatif merupakan

[39]Nurul Qamar, dkk, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2017, hlm. 2.

penelitian hukum kepustakaan.[40] Hal tersebut didasarkan pada tujuan untuk menganalisis dan mempelajari sesuatu yang berkaitan dengan kasus hukum.[41]

Penulis menjadikan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik sebagai peraturan yang akan dikaji oleh penulis.

2. Pendekatan Penelitian

Pemecahan suatu permasalahan terhadap permasalahan yang diteliti tergantung kepada cara pendekatan hukum yang dilakukan.[42] Pendekatan penelitian ini terdiri dari:

a) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Peter Mahmud Marzuki mengemukakan bahwa pendekatan perundang-undangan atau *statute approach* merupakan salah satu pendekatan yang digunakan dalam melakukan analisis pada suatu permasalahan hukum yang akan diangkat.[43] Pendekatan perundang-undangan diperlukan dalam melakukan suatu penelitian normatif, karena dalam penelitian ini yang akan dibahas lebih lanjut yaitu mengenai aturan hukum yang menjadi fokus terhadap suatu penelitian.[44]

---

[40]Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Kajian Singkat)*, Depok: Rajawali Pers, 2018, hlm.23.

[41]Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pers, 1986, hlm. 43.

[42]Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2008, hlm. 299.

[43]H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta* Disertasi, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017, hlm. 98.

[44] Johnny Ibrahim, *op.cit*, hlm. 302.

Pada penelitian ini peraturan yang menjadi fokus yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

b) Pendekatan Analisis (*Analytical Approach*)

Pendekatan analisis atau *analytical approach* yaitu melakukan analisis pada bahan hukum untuk mengetahui makna konsepsional yang tercantum dari istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan.[45] Singkatnya, pendekatan ini menganalisis isitlah-isitlah yang ada pada peraturan perundang-undangan.

Pada penelitian ini penulis melakukan analisis berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini yaitu sumber dari bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji terhadap penelitian ini, misalnya sumber yang berasal dari undang-undang, buku-buku, jurnal, artikel, internet, maupun karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian yang akan dikaji.

Bahan-bahan hukum yang digunakan yaitu:

[45]*Ibid*, hlm. 310.

a) Bahan Hukum Primer

Peter Mahmud Marzuki mengemukakan, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersumber dari perundang-undangan, risalah dalam pembuatan perundang-undangan, maupun putusan hakim terdahulu.[46] Bahan primer yang digunakan pada penelitian ini antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijke Wetboek*);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif ;
5. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik;
6. Ketentuan lain yang berkaitan dengan penelitian.

[46]Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm. 181.

b) Bahan Hukum Sekunder

Sri Mamudji dalam bukunya menyatakan bahwa bahan hukum sekunder adalah suatu bahan hukum yang memberikan pemahaman mengenai bahan hukum primer yang digunakan. Bahan hukum sekunder terdiri dari: [47]

1. Buku-buku;
2. Karya ilmiah;
3. Jurnal;
4. Makalah;
5. dan sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat menginterpretasikan bahan hukum primer dan hukum sekunder.[48] Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Ensiklopedia;
2. Kamus Hukum;
3. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
4. Media internet;
5. Bahan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

[47]Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *op.cit*, hlm. 13.

[48]Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 47.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan melakukan pencarian terhadap bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Peneliti dalam meneliti menggunakan bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan mengenai isu yang akan dibahas, bahan hukum sekunder seperti literatur ilmiah, dan sebagainya.[49]

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis pada bahan hukum merupakan proses pengelolaan data yang mana dalam melakukannya diperlukan ketelitian yang maksimal agar pemikiran dapat dicurahkan dengan baik. Peneliti membaca data yang telah dikumpulkan yang selanjutnya peneliti dapat menentukan analisis yang akan digunakan dalam penelitian yang dikajinya.[50]

Bahan-bahan hukum yang telah diperoleh pada penelitian ini akan dianalisis kualitatif, yang mana analisis kualitatif menganalisis data berdasar dari gambaran-gambaran (deskripsi) atas temuan yang ada, maka dari itu analisis kualitatif lebih mengutamakan mutu dari suatu data.[51] Analisis kualitatif menganalisis data yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, doktrin para ahli, dan sebagainya.[52]

---

[49]Peter Mahmud Marzuki, *op.cit*, hlm. 239-240.

[50]Suratman, H. Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, Alfabeta, 2015, hlm 141.

[51]H. Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 19.

[52]H. Ishaq, *op.cit*, hlm. 70.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan hasil akhir yang menjawab rumusan-rumusan masalah yang telah dikemukakan. Metode kesimpulan yang digunakan yaitu metode deduktif yang mana pada hal ini kesimpulan ditarik dari bahan-bahan yang bersifat umum menuju bahan-bahan yang bersifat khusus.[53]

[53] Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*¸ Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 11.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Achmad Zen Umar Purba. 2005. *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*. Bandung: PT. Alumni.

Adrian Sutedi. 2009. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika.

Amirudin dan Zainal Asikin. 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Bambang Sunggono. 2011. *Metode Penelitian Hukum*¸ Jakarta: Rajawali Pers.

Bandingkan, Agus Sardjono. 2009. *Membumikan HKI di Indonesia*. Nuansa Aulia: Bandung.

Candra Darusaman. 2017. Perjalanan Sebuah Lagu. Jakarta: Gramedia.

Direktorat Teknologi Informasi Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). *Buku Panduan E-HakCipta*. Jakarta: Tanpa Penerbit.

Eddy Damian. 2014. *Hukum Hak Cipta*, Bandung: Alumni.

Ermansyah Djaja. 2009. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika.

Fernando M. Manulang. 2007. *Hukum Dalam Kepastian*, Bandung: Prakarsa.

H. Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

H. Salim dan Erlies Septiana Nurbani. 2016. *Penerapan Teori Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Henry Soelistyo. 2011. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Husain Audah. 2004. *Hak Cipta dan Karya Cipta Musik*. Jakarta: PT Pustaka Litera Antar Nusa.

Hozumi, Tamotsu. 2006. *ASIAN Copyright Handbook Indonesian Version*. Jakarta: Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi).

J.C.T. Simorangkir, 1973, *Hak Cipta Lanjutan*, Jakarta: Penerbit Jembatan.

Johnny Ibrahim. 2008. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. 2020. *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*. Jakarta.

Kholis Roisah. 2015. *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI): Sejarah, Pengertian, dan Filosofi Pengakuan HKI dari Masa ke Masa*. Malang: Setara Press.

Muhammad Djumhana dan R Djubaidilah. 1997. *Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Ni Ketut Supasti Dharmawan, dkk. 2016. *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*. Yogyakarta: Deepublish.

Nurul Qamar, dkk. 2017. *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).

OK. Saidin. 2015. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: Rajawali Pers.

Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Riduan Syahrani. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2018. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Kajian Singkat)*. Depok: Rajawali Pers.

Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Pers.

Suratman, H. Philips Dillah. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.

T. Mulya Lubis. 2000. *Perselisihan Hak Atas Merek di Indonesia*¸Yogyakarta: Liberty.

Tomi Suryo Utomo. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Globalisasi, Sebuah Kajian Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Yati Nurhayati. 2020. Pengantar Ilmu Hukum. Bandung: Penerbit Nusa Media.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953).

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 86 Nomor 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6675).

Kepmenkumham Nomor: HKI.2.OT.03.01-03 Tahun 2016 tentang Pengesahan Penyempurnaan dan Perpanjangan Waktu Berlaku Tarif Royalti Untuk Rumah Bernyanyi (Karaoke)

C. Kamus

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring.

Garner, Bryan A. 2009. *Black's Law Dictionary*. New York: West.

Pono Banoe. 2003. *Kamus Musik*. Yogyakarta: Kanisius.

D. Jurnal

Afifah Husnun U.A., dkk. "Mekanisme Pengelolaan Hak Royalti Musik Oleh LMK & LMKN Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik". *Padjadjaran Law Review*. Vol. 9 No. 1. 2021.

Asma Karim. "Kepastian Hukum Lmkn Sebagai Lembaga Terpadu Satu Pintu Penghimpun dan Pendistribusi Royalti Hak Cipta dan Hak Terkait Bidang Musik dan Lagu". *Legalitas: Jurnal Hukum*. Vol. 13 No.1. 2021.

Desak Komang Lina dan I Gusti Ngurah Parwata. "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penggunaan Lagu Sebagai Suara Latar Video di Situs Youtube". *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Bagian Hukum Bisnis* Fakultas Hukum Universitas Udayana. Vol. 7 No. 10. 2019.

Edward James Sinaga. "Pengelolaan Royalti Atas Pengumuman Karya Cipta Lagi dan/atau Musik, (*Royalty on The Management of Copyright Songs and Music*)". *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum.* Vol 12 No.3. 2020.

Gede Sastrawan. "Analisis Yuridis Pelanggaran Hak Cipta Pada Perbuatan Memfotokopi Buku Ilmu Pengetahuan". *Ganesha Law Review*. Vol. 3 No. 2. 2021.

Ghaesany Fadhila dan U. Sudjana. "Perlindungan Karya Cipta Lagu dan/atau Musik yang Dinyanyikan Ulang *(Cover Song)* di Jejaring Media Sosial Dikaitkan dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta". *Acta Jurnal: Jurnal Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an* Universitas Padjadjaran Vol. 1 No. 2. 2018.

Grace Kelly Sihombing. "Peran Lembaga Manajemen Kolektif (Studi Kota Pontianak)", *Nestor Tanjungpura Journal of Law*. Vol. 4 No. 4. 2017.

Gracelina Jesyca Carmety Nyaman, dkk. "Perlindungan dan Pengelolaan Hak Royalti Pencipta Melalui Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021", *Wijayakusuma Law Review* Fakultas Hukum Universitas Janabadra Vol. 3 No. 1. 2021.

Indah Sari, "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata". *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*. Vol.11 No.1. 2020.

Komang Ardika dan Marwanto. "Pemanfaatan Lagu Secara Komersial Pada Restoran Serta Keberadaan Pengunjung yang Menyanyikan Lagu Secara Volunteer. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Bagian Hukum Bisnis* Fakultas Hukum Universitas Udayana Vol. 7 No. 6. 2019.

Mayesha Andriana, dkk. "Kewajiban Mediasi Sebelum Gugatan Ganti Rugi Perdata Atas Pelanggaran Hak Cipta di Indonesia". *Repertorium Jurnal Ilmiah* Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Vol. 10 No.2, 2021.

Murni Eva Marlina Rumapea. "Tantangan Pembelajaran Musik pada Era Digital (*Challenges of Learning Music in Digital Era*)". *Gondang: Jurnal Seni dan Budaya* Program Studi Pendidikan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan Vol. 3 No.2. 2019.

Yosepa Santy Dewi, dkk., "Implementasi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Sebagai *Collecting Society* dalam Karya Cipta Lagu (Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta)", *Diponogoro Law Review* Vol. 5 No. 2. 2016.

D. Internet

Asni Ovier, *LMK KCI Gugat Permenkumham tentang Hak Cipta*, https://www.beritasatu.com/news/533811/lmk-kci-gugat-permenkumham-tentang-hak-cipta, pada 06 Desember 2022

Assya Putri, dkk., *PP 56 Tahun 2021 Memberikan Perlindungan Hak Ekonomi Atas Komersialisasi, Benarkah?* http://blclawugm.com/pp-56-tahun-2021-memberikan-perlindungan-hak-ekonomi-atas-komersialisasi-benarkah/, pada 06 Desember 2022

Cekhki, *Mengenal Prinsip Deklaratif dalam Hak Cipta*, https://cekhki.id/mengenal-prinsip-deklaratif-dalam-hak-cipta/, pada 17 September 2022.

CNN Indonesia, *Penjelasan LMKN Soal SILM Terkait Dsitribusi Royalti Musik*, https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20211228145650-227-739631/penjelasan-lmkn-soal-silm-terkait-distribusi-royalti-musik, pada 07 Desember 2022.

Deni Setiawan, *Ahmad Dhani Kesal, Sebut LMK WAMI Tidak Transparan, Tak Dapatkan Rincian Royalti Karya Ciptaannya*, https://jateng.tribunnews.com/2022/03/19/ahmad-dhani-kesal-sebut-lmk-wami-tidak-transparan-tak-dapatkan-rincian-royalti-karya-ciptaannya, pada 10 Oktober 2022.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI., *"Deklarasi Bali" Sepakati Pemungutan Roylati Musik Satu Pintu Jadi Lebih Tertib dan Transparan*, https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/deklarasi-bali-sepakati-pemungutan-royalti-musik-satu-pintu-jadi-le

bih-tertib-dan-transparan?kategori=Berita%20Resmi%20Desain%20Industri, pada 07 Desember 2022.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, DTLST, https://dgip.go.id/menu-utama/dtlst/pengenalan, pada 16 September 2022.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, *Indikasi Geografis*, https://dgip.go.id/menu-utama/indikasi-geografis/pengenalan#:~:text=Indikasi%20Geografis%20adalah%20suatu%20tanda,dan%2Fatau%20produk%20yang%20dihasilkan, pada 16 September 2022.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, *Kantongi Izin Operasional, PRISINDO Siap Sejahterakan Para Pelaku Pertunjukan*, https://dgip.go.id/artikel/detail-artikel/kantongi-izin-operasional-prisindo-siap-sejahterakan-para-pelaku_pertunjukan?kategori=Berita%20Resmi%20Desain%20Industri, pada 25 November 2022.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, *Kekayaan Intelektual*, https://dgip.go.id/tentang-djki/kekayaan-intelektual, pada 23 Agustus 2022.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemnterian Hukum & HAM RI, *Merek*, https://dgip.go.id/menu-utama/merek/pengenalan, pada 16 September 2022.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, *Paten*, https://dgip.go.id/menu-utama/paten/pengenalan, pada 17 September 2022.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, *PP Nomor 56 Tahun 2021 Atur Royalti Lagu Musik Analog Sampai Digital*, https://dgip.go.id/artikel/detail-artikel/pp-nomor-56-tahun-2021aturroyalti-lagu-musik-analog-sampai-digital?kategori=Berita%20Resmi%20Desain%20Industri, pada 12 Mei 2022.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI. *Rahasia Dagang*, https://dgip.go.id/menu-utama/rahasia-dagang/pengenalan, pada 16 September 2022.

Haikal Kurniawan. *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Royalti untuk Pekerja Seni*, https://www.kompasiana.com/haikalkurniawan/60af1f8bd541df3826175d62/perlindungan-hak-kekayaan-intelektual-dan-royalti-untuk-pekerja-seni, pada 21 September 2022.

JDIH KEMENKO BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI. *Layanan Publik Wajib Bayar Royalti*, https://jdih.maritim.go.id/layanan-publik-wajib-bayar, pada 04 April 2022.

Kontrak Hukum. *Pengertian Desain Industri dan Alasan Pelaku Usaha Harus Mendaftarkannya*, https://kontrakhukum.com/article/Pengertian-Desain-Industri, pada 17 September 2022.

Lembaga Kawasan Sains dan Teknologi (LKST) IPB University. *Pengertian KI dan HKI*, https://dik.ipb.ac.id/ki-hki/, pada 21 Januari 2022.

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). *Pemilik Hak*, https://www.lmkn.id/pemilik-hak/, pada 03 April 2022.

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), *Reformasi LMKN dalam Transparansi Kinerja dan Restrukturisasi Peran Stakeholder (Sesuai Permenkumham Nomor 9 Tahun 2022)*, https://www.lmkn.id/reformasi-lmkn-dalam-transparansi-kinerja-dan-restrukturisasi-peran-kepada-stakeholder-sesuai-permenkumham-nomor-9-tahun-2022/, pada 08 Desember 2022

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). *Sekilas LMKN*, https://www.lmkn.id/tentang-kami/, pada 21 September 2022.

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). *Seputar LMKN*, https://www.lmkn.id/faq/, pada 04 April 2022.

Moh. Dani Pratama Huzaini. *Kenali Lembaga Manajemen Kolektif, Pelaksanaan Tata Kelola Royalti Hak Cipta di Indonesia*, https://www.hukumonline.com/berita/a/kenali-lembaga manajemenkolektif--pelaksana-tata-kelola-royalti-hak-cipta-di-indonesilt5b8668951249c, pada 02 April 2022.

Tempo.co, *DJKI Luncurkan 3 Fitur Baru Layanan KI dna Aplikasi Pusat Data Musik*, https://nasional.tempo.co/read/1662262/djki-luncurkan-3-fitur-baru-layanan-ki-dan-aplikasi-pusat-data-musik, pada 08 Desember 2022

Universitas Islam Indonesia, https://law.uii.ac.id/wp-content/uploads/2013/09/ISI%20KOmplet-2_hal%20%20423.pdf, pada 14 September 2022.

E. Skripsi

Ria Palmas Rosmala. 2021. Skripsi: *Perlindungan Hukum Hak Merek Ayam Geprek Bensu (Studi Putusan No.58/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt-Pst)*. (Palembang: Unsri).

F. Tesis

Muslim Nugraha, 2020, Tesis: *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Multimedia Dari Pembajakan yang Terdapat Pada Video Blogging (Vlog) Melalui Media Berbasis* Online. (Palembang: Unsri).

Wisjayanti. 2018. Tesis: *Penerapan Pendekatan Cotextual Teaching and Learning dalam Meningkatkan Apresiasi Siswa dalam Mata Pelajaran Musik Nusantara Kelas XII SMA Negeri 2 Baubau*. (Malang: UNM).